

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Rifki Hidayat¹ Hendry Andry²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin
Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

rifkihidayat@student.uir.ac.id hendryandry@soc.uir.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out how to implement the Implementation of the Area Traffic Control System (ATCS) Program Policy at the Pekanbaru City Transportation Office. The ATCS program is an innovation in information technology-based traffic management which is expected to improve efficiency, safety, smooth flow of vehicles and reduce congestion and violations at road intersections in Pekanbaru City. The theory used to support the analysis of the policy implementation of the ATCS program is the Policy Implementation model developed by Van Meter and Van Horn. This research has six indicators, namely policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, communication between organizations and implementation activities, attitudes of implementers and social, economic, and political environment. The research methods used are descriptive methods and qualitative approaches. The types and techniques used in data collection are: interview, observation and documentation. The data analysis technique was carried out with an interactive analysis model. The Key Informants of this study are Mr. Febrino, S.E as the Head of Traffic Engineering Management, and 6 informants. The results of this study show that in the implementation there are regulations that have not been fully implemented. This is evidenced by the fact that there are still findings of motorists violating traffic even though there has been CCTV camera monitoring with the ATCS system. The impact of ATCS on traffic smoothness has not been fully maximized and congestion is still frequent. It has not been carried out properly due to limited human resources in the operation and maintenance of ATCS, limited operational budget, limited infrastructure and technology, limited regulations related to ATCS technology, lack of awareness and education to the public, and lack of awareness and compliance from the public.

Keywords: Policy Implementation, ATCS, Pekanbaru City Transportation Agency

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Area Traffic Control System (ATCS) Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Program ATCS merupakan inovasi dalam pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan, kelancaran arus kendaraan serta mengurangi kemacetan dan pelanggaran di persimpangan jalan Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi kebijakan program ATCS ini yaitu, model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini memiliki enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis dan Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif. Key Informan dari penelitian ini adalah Bapak Febrino, S.E selaku Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, serta Informan berjumlah 6 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi terdapat peraturan yang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya temuan pengemudi yang melanggar lalu lintas meskipun telah ada pemantauan kamera CCTV dengan sistem ATCS. Dampak ATCS terhadap kelancaran lalu

Rifki Hidayat¹ dan Hendry Andry²

lintas belum sepenuhnya maksimal dan kemacetan masih sering terjadi. Belum terlaksana dengan baik dikarenakan keterbatasan SDM dalam pengoperasian dan pemeliharaan ATCS, terbatasnya anggaran operasional, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, keterbatasan regulasi terkait teknologi ATCS, kurangnya kesadaran dan edukasi kepada masyarakat, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, ATCS, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Pendahuluan

Di era yang serba modern ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan lagi dalam kehidupan manusia, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi atau kebaruan diciptakan untuk memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia.

Permasalahan utamanya didapatkan di persimpangan jalan. Persimpangan adalah simpul pada jaringan jalan dimana lebih dari satu jalan bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan. Persimpangan merupakan tempat rawan terjadinya kemacetan, karena di persimpangan terjadi pertemuan antara dua atau lebih arus Lalu-lintas. Bila arus Lalu-lintas yang berpotongan telah melalui kapasitas persimpangan, kemacetan tidak dapat dihindari. Selain itu persimpangan juga merupakan tempat yang rawan terhadap kecelakaan karena terjadinya konflik antara kendaraan dengan kendaraan lainnya ataupun antara kendaraan dengan pejalan kaki. Namun masalah lalu lintas sangat rumit karena keterlibatan berbagai parameter, di antaranya; arus lalu lintas bergantung pada waktu dimana jam sibuk lalu lintas umumnya terjadi pada pagi hari dan sore hari dan pada hari-hari kerja, sistem lampu lalu lintas yang ada bekerja dengan pengaturan waktu yang statis sehingga pengaturan lampu lalu lintas tidak sesuai dengan kondisi real-time pada persimpangan.

Sistem pengendalian waktu nyala lampu lalu lintas yang ada saat ini sebagian besarnya masih menggunakan pengendalian waktu yang terpasang pada sistemnya tanpa menggunakan sistem pengendali otomatis jarak jauh. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (2) mengatur tentang pidana atau sanksi bagi pengendara yang melanggar lampu merah dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000. Lalu lintas dan Angkutan Jalan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaran dan orang diruang lalu lintas jalan. Jika di dalam undang-undang ini juga mengatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagian dari sistem transportasi yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran ekonomi dan pengembangan wilayah.

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas, tetapi tidak benar-benar menghilangkan permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, mulai dari melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar marka jalan, tidak menggunakan helm, tidak mematuhi petunjuk jalan, tidak menjaga jaga iring, angkutan barang melebihi muatan yang dibolehkan, hingga tidak lengkapnya surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 poin 5 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; Surat Izin Mengemudi; Bukti Lulus Uji Berkala; Dan/ Atau Tanda Bukti Lain Yang

Sah, pola pikir masyarakat yang hanya takut melanggar jika ada petugas, akan tetapi ketika tidak ada petugas maka pengendara tidak merasa takut dan cenderung akan melakukan tindak pelanggaran lalu lintas.

Dalam pengawasan dan mengatur Lalu lintas, serta masalah pelanggaran lalu lintas dan kemacetan yang semakin kompleks, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan program Area Traffic Control System (ATCS). ATCS adalah sebuah sistem pengaturan lalu lintas bersinyal dan terkoordinasi yang diatur mencakup wilayah secara terpusat. Dengan ATCS maka Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya manajemen rekayasa lalu lintas yang mengkoordinasikan semua titik-titik persimpangan jalan bersinyal dengan melalui pusat kontrol ATCS, sehingga dapat diperoleh suatu kondisi pergerakan Lalu lintas secara efisien. Tujuan utama Area Traffic Control System (ATCS) adalah untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui pengaturan lampu lalu lintas yang responsive dan terkoordinasi di persimpangan jalan. Sistem ini menggunakan teknologi informasi untuk mengatur lampu lalu lintas, sehingga dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keselamatan, dan memberikan informasi lalu lintas kepada pengguna jalan. Serta untuk mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertindak sebagai pelaksana kebijakan, maka dibentuk tim pelaksana program ATCS yang bertugas mengelola pelaksanaan program ATCS di Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugas yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, Dinas Perhubungan juga melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti. Koordinasi yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan, pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru melibatkan dua instansi yaitu Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program ATCS ini mulai diberlakukan di Kota Pekanbaru pada tahun 2018, dimana ada 2 (dua) titik persimpangan yaitu di Jl. Gajah Mada-Diponegoro dan Jl. Jenderal Sudirman-Gajah Mada. ATCS ini program bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan RI. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan kenyamanan, meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan raya. Selain itu juga untuk mengantisipasi dampak lingkungan dan pengintegrasian sistem transportasi di Pekanbaru.

Berdasarkan data dari ATCS Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024.jumlah Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Pekanbaru saat ini hanya ada 5 titik lokasi ATCS yang terpasang yaitu di Jl. Soekarno Hatta-Arifin Ahmad, Jl. Jenderal Sudirman-Tuanku Tambusai, Jl. Gajah Mada-Diponegoro, Jl. Jendral Sudirman-Gajah Mada, Jl. Jenderal Sudirman-Harapan Raya. Jumlah titik CCTV belum memadai, sehingga perlu penambahan agar terlaksana lebih baik, yang mana di persimpangan jalan lampu lalu lintas terdapat masih banyak pelanggaran lalu lintas dan kemacetan yang tidak terpantau oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selain CCTV, alat pengeras suara di lampu merah atau disebut TPA (Traffic Police Announcement) masih kurang dan kalau pun ada masih terdapat yang tidak berfungsi atau rusak. Alat pengeras suara di lampu merah ini terhubung dengan CCTV dan berfungsi untuk menegur pengendara yang melanggar lalu lintas. Selain itu, pengeras suara di lampu merah juga bisa digunakan untuk menyampaikan himbauan penting, seperti penerapan protokol kesehatan. Ada petugas di ruang kontrol yang mengawasi dan kemudian langsung mengingatkan apabila ada pengguna jalan yang melanggar marka, rambu, atau pelanggaran lalu lintas lain. Tetapi dalam hal penerapan tersebut Dinas Perhubungan Pekanbaru hanya dapat menghimbau saja. Tidak dapat melakukan sanksi tilang seperti E-TLE, hal ini tidak terlalu efektif bagi pada pengguna jalan karena hanya terkesan mengingatkan saja dan tidak ada upaya lanjutan berupa sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Dimock dan Dimock dalam (Hajar Malawat, 2022) menjelaskan bahwa kata administrasi berasal dari kata “ad” dan “minister” yang berarti juga “to serve”. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan.

Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.

Konsep Organisasi

Menurut Malawat (2022), menyatakan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Siagian (2003:6) menyatakan bahwa organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Konsep Manajemen

Manajemen menurut Siagian (2003:5) didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan material untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut George R. Terry dalam (Maksudi, 2017) merumuskan fungsifungsi manajemen populer disingkat menjadi POAC, *Planning* (Perencanaan), *Orgnizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan).

Konsep Implementasi

Implementasi secara harfiah sering dipersamakan dengan sebuah pelaksanaan, implementasi sebagai sebuah konsep memiliki cakupan makna dan pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar sebuah kata pelaksanaan dari sebuah harapan dan keinginan (Jumroh, 2022: 41)

Sementara itu, menurut Marilee S. Grindle (1980) juga memberikan pandangan tentang Implementasi yang dikutip dalam (Kasmad, 2013) dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Konsep Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. (Penjajitan & Pardede, 2021).

Anggra (2014) dalam (Dewi, 2022) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan.

Program Area Traffic Control System (ATCS)

Program Area Traffic Control System (ATCS) merupakan suatu program pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas disetiap persimpangan.

Area Traffic Control System (ATCS) atau dalam bahasa Indonesia diartikan Sistem Kendali Lalu Lintas merupakan salah satu dari upaya manajemen rekayasa lalu lintas yaitu pengendalian lalu lintas pada persimpangan yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. ATCS ini merupakan suatu sistem yang mengatur persimpangan jalan dan bisa memperingati melewati CCTV bersuara kepada pengendara yang terlihat melanggar marka jalan dan rambu lalu lintas.

Metode

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan variabel yang diteliti. Tipe Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif yang bersifat mendeskripsikan "makna data" atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisisnya yang menggambarkan tentang keadaan yang sebenarnya tentang Implementasi Kebijakan Program Area Traffic Control System (ATCS) Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator pertama ialah standar dan sasaran kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwasanya dalam mengukur kinerja suatu implementasi kebijakan, para implementor harus mencapai standar dan sasaran kebijakan yang harus terurai dengan jelas sehingga para implementor dapat mengerti, memahami dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam indikator standar dan sasaran kebijakan ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu kesesuaian standar pelaksanaan dengan kenyataan dan tercapainya sasaran dan tujuan kebijakan ATCS yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Standar Dan Sasaran Kebijakan, pada sub indikator Kesesuaian Standar Pelaksanaan Dengan Kenyataan menunjukkan bahwa secara konseptual, program Area Traffic Control System (ATCS) di Pekanbaru sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pedoman nasional Kementerian Perhubungan. Namun, dalam praktiknya, Implementasi ATCS di Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan sistem ini belum sepenuhnya optimal. Seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur dan anggaran yang menyebabkan cakupan ATCS masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah kota. Masyarakat juga merasakan ketidaksesuaian antara harapan

dan realita. Meskipun kamera CCTV terpasang, penindakan pelanggaran. Hal ini membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas ATCS dalam mengurangi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Standar Dan Sasaran Kebijakan, pada sub indikator Tercapainya Sasaran dan Tujuan ATCS menunjukkan bahwa pada dasarnya sasaran dan tujuan ACTS untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui pengaturan dan koordinasi lampu lalu lintas di persimpangan jalan, serta meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Sedangkan yang terjadi di Pekanbaru sasaran dan tujuan ACTS masih belum optimal atau tercapai, karena keterbatasan sumber daya, infrastruktur dan anggaran yang menyebabkan cakupan ATCS masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah kota. Serta tidak ada penindakan hukum yang dilakukan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Jadi, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan Dishub guna untuk tercapainya sasaran dan tujuan program ATCS ini.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator kedua ialah sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber Daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta sumber daya lain (finansial dan waktu). Dalam indikator sumber daya ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tersedianya Sumber Daya Non- Manusia (Sarana, Prasarana, dan Anggaran).

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Sumber Daya, pada sub indikator tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) menunjukkan bahwa Idealnya, operasional ATCS yang berjalan 24 jam penuh sesuai standar nasional membutuhkan setidaknya tiga shift kerja, masing-masing dengan dua hingga tiga personel. Namun, karena keterbatasan pegawai, tim hanya mampu mengisi dua shift per hari, sehingga shift malam tidak dapat dijalankan.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Sumber Daya, pada sub indikator tersedianya Sumber Daya Non Manusia (Sarana, prasarana dan anggaran) menunjukkan bahwa secara umum, operasional ATCS di Pekanbaru telah didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana dasar. Namun, jumlah kondisi peralatan ini masih jauh dari ideal. Beberapa kamera CCTV sudah tua (lebih dari lima tahun) dengan kualitas gambar yang menurun dan banyak titik baru yang belum terjangkau oleh sistem ATCS karena keterbatasan anggaran dan perangkat. Meskipun ruang kontrol sudah cukup memadai dari sisi fasilitas dasar, sistem monitoring masih belum optimal. Perangkat lunak yang digunakan belum sepenuhnya mendukung fitur analisis lalu lintas otomatis, sehingga banyak proses yang masih harus dilakukan secara manual oleh operator.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator ketiga ialah Karakteristik Organisasi Pelaksana. Karakteristik organisasi pelaksana yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik mencakup struktur organisasi, standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta

lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam indikator karakteristik organisasi pelaksana ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu organisasi pelaksana yang terlibat dalam kebijakan dan ruang lingkup implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Karakteristik Organisasi Pelaksana, pada sub indikator Organisasi Pelaksana Yang Terlibat Dalam Kebijakan menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi sudah berjalan cukup baik, serta komunikasi aktif dan kesamaan visi menjadi kunci keberhasilan program, beberapa tantangan teknis dan birokrasi masih ada, terutama dalam berbagi data dan penindakan pelanggaran karena perbedaan regulasi dan wewenang. Namun, rapat koordinasi lintas sektor rutin diadakan untuk menyamakan persepsi dan mengatasi hambatan, menunjukkan komitmen bersama untuk mengoptimalkan ATCS di Kota Pekanbaru.

Demikian berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Karakteristik Organisasi Pelaksana, pada sub Ruang Lingkup Implementasi Kebijakan menunjukkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan ATCS masih terbatas di sekitar lima persimpangan utama. Wilayah pinggir atau persimpangan sekunder belum tersentuh ATCS karena keterbatasan sarana, sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, cakupan ATCS di Pekanbaru bersifat bertahap dan terbatas, disesuaikan dengan prioritas lalu lintas dan kapasitas yang tersedia. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pengaturan teknis lalu lintas, tetapi juga mendukung penegakan hukum dan pelayanan informasi lalu lintas kepada masyarakat melalui koordinasi dengan pihak kepolisian.

Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator keempat ialah Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Pada tahap ini menekankan pada koordinasi komunikasi mekanisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Dalam indikator Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dan komunikasi yang tepat dan akurat.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, pada sub Pengambilan Keputusan Dalam Pelaksanaan Kegiatan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan operasional ATCS di Kota Pekanbaru dilaksanakan secara kolaboratif dan berbasis data. Data lalu lintas yang dikumpulkan dari kamera dan sensor dianalisis oleh tim teknis untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Untuk keputusan yang menyangkut tindakan penertiban atau penegakan hukum, Dishub selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hambatan atau tantangannya adalah dalam hal respon cepat antar instansi ketika menghadapi kondisi darurat, seperti kecelakaan lalu lintas atau kemacetan mendadak, yang seringkali terhambat oleh perbedaan prosedur atau keterbatasan akses langsung ke sistem ATCS. Keterlambatan dalam berbagi informasi juga masih terjadi karena belum semua pihak memiliki akses yang sama terhadap data real-time.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, pada sub Komunikasi Yang Tepat dan Akurat menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan secara aktif menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Satlantas, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta

pihak-pihak teknis lainnya. Komunikasi dilakukan baik secara formal melalui rapat koordinasi, surat menyurat, dan laporan resmi, maupun secara informal melalui media digital seperti grup WhatsApp, panggilan cepat dan koordinasi langsung di lapangan. Namun, pelaksanaan komunikasi lintas sektor juga menghadapi tantangan, seperti gangguan teknis pada jaringan internet, gangguan listrik, serta kerusakan perangkat ATCS di beberapa titik. Dari sisi masyarakat, informasi lalu lintas dari ATCS umumnya diperoleh dari media sosial seperti Instagram. Meskipun dirasa cukup membantu, penyampaian informasi ini masih terbatas dan tidak dilakukan secara rutin, sehingga masyarakat terkadang lebih mengandalkan pengamatan langsung di lapangan.

Sikap Para Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator kelima ialah Sikap Para Pelaksana. Sikap para pelaksana kebijakan (implementor) sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap mereka, baik penerimaan maupun penolakan, dapat mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut. Penting bagi para pelaksana untuk memahami standar dan tujuan kebijakan serta memiliki komitmen untuk mencapainya. Dalam indikator Sikap Para Pelaksana ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu pemahaman/pengetahuan kebijakan oleh para pelaksana dan sikap pelaksana terhadap menerima atau tidak kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Sikap Para Pelaksana, pada sub Pemahaman/Pengetahuan Kebijakan Oleh Para Pelaksana menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan program ATCS, khususnya di bidang manajemen rekayasa lalu lintas dan pengendalian ATCS memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan program ini. Pemahaman ini dibangun melalui pelatihan teknis dan pemahaman kebijakan sejak awal implementasi, serta didukung oleh pembaruan informasi dan sosialisasi internal yang rutin. Namun demikian, terdapat catatan penting dari sisi masyarakat, yakni masih minimnya edukasi langsung dari petugas ATCS di lapangan. Sebagian besar masyarakat memperoleh informasi hanya melalui media sosial.

Sedangkan Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Sikap Para Pelaksana, pada sub Sikap Pelaksana Terhadap Menerima Atau Tidak Kebijakan menunjukkan bahwa para pelaksana ATCS sudah menunjukkan sikap yang sangat positif dan menerima kebijakan ATCS dengan baik. Mereka menjalankan tugas sesuai aturan, seperti memantau pelanggaran, mengarahkan lalu lintas dan berkoordinasi dengan kepolisian saat terjadi kecelakaan atau kemacetan. Namun, dari sisi masyarakat tentang para pelaksana ATCS ini, masih minimnya edukasi langsung dari petugas ATCS di lapangan. Untuk mencapai tujuan kebijakan ATCS secara optimal dan menyeluruh, petugas perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator keenam ialah Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam indikator

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan dan dukungan dari kelompok kepentingan.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik , pada sub Lingkungan Yang Dapat Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan sosial, dukungan dari terhadap pelaksanaan ATCS tergolong cukup positif. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap efektivitas program ATCS ini dalam mengatasi kemacetan dan mengurangi pelanggaran lalu lintas. Walaupun kesadaran dan kedisiplinan pengendara yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Dukungan anggaran dan bantuan pengadaan peralatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perhubungan juga menjadi penopang penting dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan sistem ATCS. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ATCS tidak hanya bergantung pada teknologi dan pelaksana, tetapi juga pada dukungan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai.

Sedangkan Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik , pada sub Dukungan Dari Kelompok Kepentingan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ATCS di Pekanbaru melibatkan berbagai kelompok kepentingan yang krusial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok-kelompok ini mencakup Pemerintah Daerah dan Pusat, masyarakat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotik). Masing-masing memiliki peran spesifik. Meskipun terdapat tantangan seperti perbedaan prioritas antar instansi, kendala sinkronisasi jadwal dan hambatan birokrasi dalam pengadaan integrasi sistem, koordinasi antarpihak secara umum berjalan cukup baik. Forum lintas sektor yang rutin dilaksanakan menjadi wadah efektif dalam menjaga komunikasi dan keharmonisan antar kelompok kepentingan. Dengan adanya kolaborasi ini, implementasi kebijakan ATCS dapat terus berjalan secara optimal dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah Implementasi kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan pendekatan yang cukup terstruktur dan berorientasi pada peningkatan efisiensi lalu lintas di kawasan perkotaan. ATCS ini diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui pengaturan lampu lalu lintas yang responsive dan terkoordinasi di persimpangan jalan. Sistem ini menggunakan teknologi informasi untuk mengatur lalu lintas yang terintegrasi dengan command center atau pusat kendali, sehingga dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi lalu lintas, meningkatkan keselamatan, memberikan informasi lalu lintas kepada pengguna jalan, serta menindak pelanggaran secara real-time dengan menggunakan pengeras suara melalui sistem pemantauan kamera CCTV di ruang kendali ATCS. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah dilaksanakan dengan upaya yang cukup baik oleh Dinas Perhubungan, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Perlu upaya

peningkatan di berbagai aspek, baik dari sisi teknis, kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat agar program ini berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS) Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yakni faktor pendukungnya seperti adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, adanya koordinasi dan kolaborasi antar instansi seperti Satlantas Polresta Pekanbaru untuk penegakan hukum dan penyesuaian pola lalu lintas. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) juga penting untuk dukungan jaringan dan publikasi, ketersediaan data lalu lintas secara real-time yang bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Data ini menjadi alat penting dalam menganalisis kepadatan lalu lintas, titik rawan kemacetan dan waktu respons insiden lalu lintas, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas program ATCS ini dalam mengatur dan mengendalikan lalu lintas secara otomatis dan efisien. Sedangkan faktor penghambatnya seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur dan perangkat teknologi, keterbatasan sumber daya pemeliharaan dan pengembangan sistem ATCS, kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat, keterbatasan regulasi tentang teknologi, ketergantungan pada teknologi dan cuaca, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman publik tujuan dan fungsi dari sistem ATCS.

Daftar Pustaka

A. Buku & Jurnal

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Andi Zulfikar, Z. (2018). *ANALISIS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN ATCS (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) DI KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN
- Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh .
- Aslinda, Guntur, M., & Nur, A. C. (2019). *Pengembangan Dan Perubahan Organisasi*. Yogyakarta: K-Media.
- Effendhie, M. (2011). Pengantar Organisasi. Organisasi Tata Laksana Dan Lembaga Kearsipan, 1-90.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: NUSAMEDIA.
- Hajar Malawat, S. (2022). Buku Pengantar Administrasi Publik. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ahri Publishing. Makassar).
- Hendrayady, A., Arman, A., Satmoko, N. D., Afriansyah, A., Heriyanto, H., Sholeh, C., ... & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.

- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer*. Bogor: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Muhlisin, M. (2023). *Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Neviana, N. E., & Soedarsono, D. K. (2020). Aktivitas Komunikasi Atcs Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandung (Studi Deskriptif ATCS Kota Bandung Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Pengeras Suara di Persimpangan). *eProceedings of Management*, 7(3).
- Panjaitan, D. T., & Pardede, P. D. (2021). *Administrasi Publik*. Kabupaten Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Pramestarivia, A. N., & Sahidi, I. T. (2022). Implementasi Area Traffic Control System (ATCS) Sebagai Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Kota Malang. *Journal of Governance Innovation*, 4(2), 101-115.
- Prasetyo, S. (2016). Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Atcs (Area Traffic Control Sytem) Di Kota Bandar Lampung.
- Sanjaya, A. B. (2020). *Efektivitas Program Area Traffic Control System (Atcs) Dalam Meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Saputra, R. M. (2014). Analisis perencanaan penerapan area traffic control system di kota Pangkal Pinang. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 2(3).
- SARWANI, M. (2022) EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS.
- Syafri, H. W. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Penerbit Erlangga.
- Syafri, W., & Setyoko, I. P. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik Etika Profesi Pamong Praja*. Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakanann Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteran Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.

- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliato, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.

- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Sosio Konsepsia, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). Jurnal Wacana, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. Gema Publica, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. Jurnal Niara, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). VALUTA, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. International Journal of Sustainable Development & Planning, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 5(2), 32-37.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). **PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

- DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliato, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.

- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun

District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

B. Regulasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 93 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 106 Ayat 4.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (2) tentang tentang pidana atau sanksi bagi pengemudi yang melanggar lampu merah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 poin 5 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; Surat Izin Mengemudi; Bukti Lulus Uji Berkala; Dan/ Atau Tanda Bukti Lain Yang Sah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 231 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.